

DEMOKRASI MINIM OPOSISI: NARASI MAHA PUITIS SEJARAH ATAS REDUKSI OPOSISI

Oleh:

Moch. Agung Lukmanul Hakim¹, Cecep Darmawan², Leni Anggraeni³

^{1,2,3}FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

¹Email: mochagung.lukmanulhakim@upi.edu

²Email: cecepdarmawan@yahoo.com

³Email: l_anggraeni@upi.edu

Abstrak

Ketika menyampaikan Visi Pembangunan tahun 2019-2025, Presiden Jokowi menegaskan oposisi diperbolehkan selama tidak menimbulkan alur fragmentasi dan instabilitas berlebihan. Dalam kesempatan berbeda berkaitan dengan bergabungnya Partai Gerindra ke dalam pusat pemerintahan, Presiden Jokowi menampilkan sikap yang kontras dan kontradiktif bahwa tampilan demokrasi Indonesia tidak mengenal eksistensi oposisi, melainkan demokrasi berbasis gotong royong. Tentu pernyataan demikian dinilai sangat tidak kontekstual, kesalahan dalam memahami terminologi demokrasi, bahkan kekeliruan besar dalam melihat substansi sistem pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan berbagai penyelidikan signifikansi dan implikasi dari keberadaan oposisi, termasuk reduksi dengan tendensi yang lumayan signifikan terhadap pelembagaan oposisi. Penelitian ini dilakukan dengan berbagai eksplorasi rimba raya informasi dari 49 artikel, 6 berita online, serta 6 literatur yang lain secara mendalam untuk menegaskan konstruksi dari krusialitas oposisi secara normatif dalam demokrasi. Hasil dari penelitian ini menempatkan eksistensi oposisi sebagai ruh inheren dalam prinsip demokrasi, dapat menghadirkan intervensi prima terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih moderat. Dalam sejarah demokrasi Indonesia, setiap rezim yang tengah berkuasa mempunyai tendensi signifikan untuk melakukan reduksi terhadap oposisi dengan penerapan kooptasi dan koersi yang terus beregenerasi dalam entitas terbaru melalui samaran kontinum. Sebagai implikasi dari penelitian ini, sejarah demokrasi Indonesia menjadi untaian narasi puitis panjang atas reduksi eksistensi oposisi yang terlihat mendapatkan pembenaran dari perjalanan bangsa.

Kata Kunci: Demokrasi, Reduksi, Oposisi, Kekuasaan.

1. PENDAHULUAN

Ketika penilaian masyarakat terhadap berbagai masalah sosial secara sistemik tidak sanggup mempengaruhi kebijakan pemerintahan, keberadaan dan kompetensi oposisi seharusnya menjadi jalan mumpuni terakhir untuk menghadirkan tanggung jawab pemerintah (Seeberg, 2018), yang sekaligus menjadi strategi menguntungkan dalam mendapatkan dukungan besar publik (Resnick, 2012). Hanya saja demokrasi dan oposisi yang secara substantif tidak ubahnya dua sisi dalam konstruksi sekeping uang logam (Pratama, 2020), sedari lama telah mengalami reposisi normatif karena berhadapan dengan abstraksi persamaan karakteristik dari klientelisme sentralistik dalam hal arus transaksi non-pragmatik (Ramadhan dan Oley, 2018), yang alih-alih antara penguasa dengan pihak lain (Martin, 2006; Wantchekon, 2003), justru secara terbuka berlangsung bersama mantan lawan politik dalam pemilihan. Pelembagaan dan keberadaan oposisi dalam sejarah demokrasi Indonesia menjadi sebuah alegori dari kelompok di bawah kekuasaan tanpa celah penguasa (Pratama, 2018). Ketika titik kulminasi dari keberhasilan penyelenggaraan demokrasi secara substantif akan menuntut eksistensi ruang partisipasi politik masyarakat secara terbuka (Anggraeni, 2016), maka pelembagaan kalangan

oposisi akan menjadi alternatif konstitusional dalam mempersiapkan saluran kepentingan sebagai sentimen dan preferensi warga-negara yang belum terakomodasikan ke dalam skema kebijakan pihak yang tengah berkuasa.

Setiap rezim kekuasaan selalu memiliki langkah cermat dalam mengantisipasi sentimen publik terhadap mereka yang dinilai penolakan demokratis, yang pada sisi lain dipicu oleh peristiwa internal serta difasilitasi dengan tindakan bersama oposisi (Brancati dan Lucardi, 2018). Sehingga tidak mengherankan terdapat tendensi besar terjadi reduksi dengan fragmentasi kekuatan oposisi, termasuk membangun desains koalisi untuk menjamin akselerasi pemerintahan (Munadi, 2019). Reduksi terhadap oposisi secara signifikan akan menjadi pola permasalahan krusial dalam demokrasi, karena hanya tersisa sedikit ruang pengawasan pada pemerintah. Transaksi politik berdasarkan sistem *Checks and Balances* hanya akan menjadi kumpulan bait puitis yang tidak bertuan. Oposisi tidak lebih dari kumpulan mereka yang terbuang secara dramatik dalam perjuangan politik, entitas binatang jalang dari kumpulan terbuang. Kurang lebih relevan dengan penggalan puisi "Aku" dari penyair kawakan Chairil Anwar. Pelembagaan oposisi berada dalam dasar titian anak tangga yang tidak lagi dapat

mengimbangi kekuatan pemerintah dengan kekuasaan prima di puncak anak tangga kekuasaan tertinggi. Dalam konteks pemikiran yang ideal, keberadaan dari oposisi merupakan terminologi lain dari penyelenggaraan demokrasi, karena tidak mungkin dapat disangkal keduanya merupakan bayi kembar siam, yang berada pada jalur bifurkasi yang bersimpangan.

Dalam konteks penyelenggaraan dari demokrasi, setiap kelompok masyarakat mempunyai ruang kebebasan yang inheren dengan hakikat dari warganegara untuk menyampaikan pandangan, menunjukkan kritik yang mendasar terhadap pemerintah termasuk melakukan pengawasan terkait artikulasi pelaksanaan kekuasaan sendiri oleh pihak yang berkuasa dewasa itu. Karena bagaimanapun juga, dalam kehidupan negara demokrasi bahwa penyimpangan terhadap asas demokrasi selalu akan terjadi seperti politik uang (Anggraeni dan Ramdhani, 2018) dalam implementasi langsung pemilihan elektoral. Terlepas dari hal tersebut, setiap kelompok dalam masyarakat mempunyai probabilitas tidak terbatas dalam menempati kedudukan krusial oposisi bersama kalangan partai politik yang berada di luar bayangan agung dari penguasa. Ketika pemerintah menjalankan reduksi terhadap oposisi dalam samaran kontinum tersamar sekalipun, maka sesungguhnya pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan mencederai Hak Asasi Manusia. Karena prinsip demokrasi menuntut pemerintah untuk hanya mempunyai konsentrasi terhadap jaminan prima terkait pemenuhan hak asasi warga negara yang tidak dapat direstriksi, kecuali pada situasi tertentu. Ketika pemerintah mencoba membangun nuansa atmosfer artikulasi sebagai tujuan terkamufase dalam konfigurasi kekuasaan dan menjalankan reduksi terhadap keberadaan oposisi dengan krtikan sumbang, pada pada situasi yang sama demokrasi tidak lebih dari signifikansi hierarkis terluar untuk menutupi konfigurasi potret oligargis yang menjadi kegagalan akuntabilitas pemerintahan.

Kegagalan akuntabilitas pemerintahan otokratik dapat memberikan implikasi destruktif berupa peningkatan kemampuan pemerintahan dalam mereduksi oposisi yang dinilai tidak dapat bekerja sama (Kosterina, 2016), sehingga tidak lagi terdapat kesempatan terbuka untuk menampilkan reputasi prima sebagai pelindung berbagai kepentingan masyarakat. Sampai dewasa ini, budaya oposisi belum mengakar kuat dalam demokrasi Indonesia yang dengan konkrit terlihat dalam arogansi penguasa yang mengabaikan legitimasi dan krusialitas partai oposisi (Pratama, 2018). Setelah kemerdekaan, oposisi terjebak dalam ruangan rimba infinit ekstrimisme dan hampir empat dekade mendapatkan justifikasi sebagai sumber instabilitas. Bahkan pada erareformasi sekalipun, pelembagaan oposisi belum memberikan perubahan signifikandan dinilai sebagai posisi yang tidak menguntungkan (Noor, 2016), padahal oposisi menandakan kualitas

realitas demokrasi yang terkelola secara elegan (White, 2006). Pada masa demokrasi langsung, terjadi formasi koalisi gemuk dalam pemerintahan Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjadi implikasi logis direrancang bangun konstitusi yang tidak sepenuhnya menguatkan sistem pemerintahan presidensial. Sistem kepartaian hanya menghasilkan eksistensi multi partai (Rishan, 2020) dengan instrumen ideologi kepartaian yang begitu rapuh (Noor, 2016). Tidak terlalu sulit untuk melakukan identifikasi bahwa masih terdapat kalangan elit politik yang tidak menghayati sepenuhnya filsafat Pancasila sebagai basis ideologi seluruh partai politik. Padahal Pancasila merupakan pedoman bahkan arah tujuan berbagai kelompok untuk merealisasikan kemajuan dan juga memperkuat kedaulatan negara (Anggraeni, Darmawan dan Tanszil, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan eksplorasi rimba raya informasi 49 artikel, portal berita online, dan literatur lainnya dengan mempertimbangkan beberapa alur dasar dalam metode PRISMA terkait pola penetapan kriteria dan eliminasi literatur. Penelitian diawali dengan cara menentukan tujuan dan identifikasi literatur relevan, eksplorasi literatur dengan kriteria yang ditetapkan, melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap literatur dan menetapkan agregasi signifikansi sebagai jawaban dari tujuan yang memuat kesenjangan penelitian. Adapun pencarian artikel terbaru dilakukan di *Science Direct*, *SAGE Publication*, *Springer*, *John Wiley and Sons* dan *Taylor and Francis*, serta *Google Scholar* dengan dilengkapi kajian beberapa berita online, termasuk literatur lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wacana politik dalam ranah institusional tidak hanya memberikan legitimasi terkait kebijakan pemerintahan, melainkan termasuk perbedaan pendapat (Coy dan Woehrie, 2008). Oleh karena itu dalam model normatif, oposisi menjadi alternatif dari pemerintah yang memberikan informasi berimbang kepada masyarakat tentang kompetensi pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam format yang jauh lebih moderat, melalui intervensi elegan oposisi. Oposisi yang umumnya muncul dengan desain ramping dapat membantu menjadi perantara konsensus pemerintah bersama koalisi dengan masyarakat. Bagaimanapun juga, oposisi dalam demokrasi memiliki desain konstruksi yang relevan dengan koalisi pemerintah sebagai jaminan prima dari keseimbangan pemerintahan demokratis. Oposisi harus memiliki strategi besar dalam menghadapi pemerintah yang mempolarisasi realitas krusial tertentu dengan berorientasi pada kelemahan polarisasi tersebut (Sommer dan McCoy, 2019). Strategi oposisi yang kurang relevan, memang menjadi penjelasan rasional mengapa oposisi tidak

berperan dalam pengambilan keputusan dan pembentukan opini ruang publik. Oposisi sendiri secara faktual, memang jarang terlihat muncul langsung di hadapan masyarakat dengan gagasan intelektual yang menjakjubkan, sehingga publik tidak merasakan secara lebih realistis bahwa gagasan sebagai kritik terhadap pemerintah dapat mengatasi masalah publik secara akurat.

Reduksi terhadap oposisi tidak pernah dapat dibenarkan, karena tidak terdapat demokrasi paripurna tanpa eksistensi oposisi, sekalipun masih sukar melaksanakan pengembangan reposisi teoritis yang lebih moderat tentang oposisi (Ludger, 2008). Oposisi tidak jarang mendapatkan reduksi dari pemerintah, karena dipandang tidak memiliki pengaruh dalam memperbaiki realitas dengan hanya tuduhan dan kritikan. Sebuah penelitian merepresentasikan oposisi yang telah menempati kursi parlemen Argentina sedari tahun 1983-2017 terbukti memberikan berbagai kontribusi holistik terhadap pemerintah (Clerici, 2020), dengan menekankan krusialitas isu dan kohesi partai sebagai interaksi intensif diantara pemerintah dan oposisi (Pedrazzani, 2017). Karena itu, alasan paling rasional dari reduksi, karena partai oposisi yang konsisten menjaga kredibilitas posisi penyeimbang sebagai penghargaan partisipan, tidak lain menjadi ancaman signifikan terhadap kekuasaan pemerintahan di masa mendatang. Terlebih kekuatan oposisi dalam kekuasaan otokratik selalu mendorong melakukan kritikan terbuka, tajam dan kontekstual terhadap setiap langkah dari penguasa yang semakin melangkah secara sentralistik. Hanya saja, ketika kekuatan oposisi muncul dalam samaran kontinum yang telah terfragmentasikan dalam kekuatan kecil seperti halnya suara lantang jalanan, maka kekuatan oposisi tersebut bukan halangan besar yang dapat menjamin akselerasi *Checks and Balances*.

Bahwa oposisi memiliki tendensi merepresentasikan kinerja berkualitas prima dalam partisipasi politik pemilih yang tinggi, sekalipun dalam konteks diluar proses demokrasi (Frantz, 2018). Hal tersebut juga dapat memberikan penjelasan mengapa pemilihan Presiden Taiwan tahun 2000, untuk kali pertama kandidat oposisi sukses memenangkan pemilihan Presiden (Niou dan Paulino, 2003), terlepas dari kesulitan yang mungkin akan dihadapi Presiden dalam kapasitas sebagai pemimpin kekuatan oposisi (Crocket, 2003). Reduksi oposisi bukan hanya karena dinilai sebagai bentuk ancaman kekuasaan, melainkan ideologi kepartaian yang rapuh. Sistem kepartaian Indonesia telah menghadirkan sistem partai yang semakin mengandalkan kharisma, yang berkontribusi signifikan terhadap kualitas partai yang disfungsi, koruptif, opportunistik, dan mencari keuntungan (Fionna, 2016). Tidak mengherankan kajian tentang partai politik dalam parlemen Indonesia menampilkan koordinasi yang jelas inkonsisten dan rapuh antara partai atau fraksi

(Sherlock, 2012). Terdapat relevansi tinggi antara pemilih dengan elit politik, sebagian dapat dikorelasikan dengan ranah sosialisasi dan jaringan sosial, namun tidak menutup probabilitas dipengaruhi pula oleh partai dalam frekuensi ideologis. Sampai dewasa ini, sangat jarang terlihat elit politik yang penuh kharisma menempati kedudukan oposisi sebagai bentuk alegori dari bayangan semu yang mengancam sumber bayangan alias penguasa dan seluruh kelompok yang berada dalam lingkaran penguasa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap rezim kekuasaan memiliki orientasi yang spesifik terhadap integritas pembentukan kebijakan, dibandingkan yang mengambil tempat di luar pemerintahan dengan partisipasi yang memang kurang integratif (N. Sitter, 2001). Hal demikian menunjukkan bahwa pemerintah dan oposisi cenderung saling bertentangan dalam setiap kepentingan mereka sendiri, meskipun pemerintah sangat diuntungkan atas nama legitimasi dan integritas. Dalam demokrasi, kekuatan oposisi memungkinkan untuk meminta tanggung jawab pemerintah (Arena, 2015). Pemerintah perlu menerima oposisi dengan tidak memberikan ruang pertentangan yang memasuki kontelasi keabsahan atau legitimasi dari oposisi, sekali pun oposisi jarang terlihat tampil sempurna dalam preferensi mereka (Tuttnauer, 2018). Belum diketahui secara mendalam latar belakang reduksi pelembagaan oposisi, sementara perubahan strategi dari oposisi menunjukkan perubahan signifikan dalam hubungan pemerintah dan oposisi yang tidak bergantung pergantian penguasa (Ludger, 1998). Karena itu, diperlukan kajian utuh berkenaan krusialitas dan reduksi oposisi sebagai falsifikasi atau berpikir ulang tentang demokrasi. Bagaimanapun juga, keberadaan oposisi yang proporsional merupakan indikator utama penyelenggaraan demokrasi yang sesungguhnya. Sementara demokrasi sendiri menjadi antededen rasional yang mau ataupun tidak mau dapat menghadirkan keberadaan oposisi, karena keduanya hadir dalam jalur interdependensi absolut.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, peran krusial oposisi dilakukan oleh partai Masyumi. Sebagai kelompok penekan, partai oposisi dituntut untuk dapat mumpuni memenuhi kebutuhan terkait kualitas perbedaan dengan pemerintah, meningkatkan daya tarik dengan persaingan terbuka secara elegan, dan memiliki pengaruh holistik dalam pengambilan beragam keputusan, serta pengawasan langsung (Louwerse dan Otjes, 2018). Relasi konstruktif Masyumi dengan Soekarno berubah menjadi jurang diametral perselisihan terbuka, karena oposisi menilai lebih baik memberikan suara lantang menolak (Demirkaya, 2019) daripada tidak tulus menerima pola kekuasaan pemerintahan yang tidak nyata terpopularisasi. Sangat tidak mengherankan bahwa Soekarno menilai budaya oposisi dewasa itu, hanya bertujuan menumbangkan roda pemerintahan, bahkan menggantinya dengan oposisi. Pembuat kebijakan

umumnya mempercayai intervensi tidak dapat meningkatkan kinerja demokrasi, mungkin atas pertimbangan tersebut, tahun 1959 dikeluarkan Penetapan Presiden tentang regulasi mengurangi kompleksitas partai, setahun kemudian diterbitkan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum pembubaran Masyumi (Fadli, 2020). Pertentangan antara para penguasa dengan oposisi tidak jarang terlihat dalam perlintasan paradoks.

Karena kepentingan yang terselubung telah melembaga dalam realitas politik, maka penolakan terhadap perubahan kelembagaan menjadi hal rasional (Davidson, 2019). Hal yang sama juga menjadi dorongan Masyumi menjalankan peran oposisi sebagai penilaian terukur terhadap kualitas demokrasi, lanjutan dari ketidakpuasan terhadap rekonsiliasi kemacetan politik secara melembaga melalui dekrit. Memang tidak sedikit kalangan yang menilai landasan hukum dekrit, lebih berorientasi pada situasi darurat yang pada mulanya mendapatkan dukungan dari DPR dan pendapat hukum, yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Presiden untuk kembali kepada UUD terdahulu. Namun demikian, roda perputaran waktu dengan perjalanan sejarah telah menunjukkan dekrit tersebut sebagai dasar kelahiran seorang pemimpin otoriter dan sentralistik. Bagaimana pun juga, Masyumi sebagai oposisi Sukarno tidak memiliki konstruksi organisasi dan kelembagaan mapan, sulit melakukan penelusuran hasrat masyarakat terkait isu-isu stagnasi politik. Kekuasaan pemerintah tanpa celah, tidak terdapat pengawasan signifikan, kalkulasi berlebihan tentang probabilitas berbagai fragmentasi dan instabilitas sebagai kelemahan terhadap antagonisme politik, menjadi kombinasi adekuat pelemahan oposisi dewasa itu.

Sebelum bulan Mei Tahun 1998, tidak terdapat konfrontasi politik di kalangan elite otoritarian dalam lingkaran penguasa. Secara substantif menjadi situasi kondusif bila dikorespondensikan dengan perubahan rezim kekuasaan (Bunce, 2000). Bahwa rezim Soeharto mengalami transformasi semakin otokratik dan personalistik, tidak tersisa ruang bagi para reformis dalam struktur rezim untuk mengadakan kompromi dengan pendukung demokrasi di luar lingkaran penguasa. Beberapa pemimpin oposisi dengan kalkulasi potensi dan probabilitas memilih membangun perdamaian dengan rezim, menolak untuk terlibat konfrontasi langsung, dan sebagian lain mendapatkan penindasan total (Horowitz, 2014). Perpecahan sosial dan fragmentasi oposisi, telah menghambat kelahiran pemimpin yang dapat merepresentasikan oposisi, karena itu kehilangan pengaruh signifikan dalam persaingan politik. Ketika oposisi memang tidak memberikan konfrontasi dengan berbagai penolakan (Daase dan Deitelhoff, 2019) sebagai penjelasan rasional dominasi rezim kekuasaan (Zieglfeld dan Tudor, 2015), maka demonstrasi dalam skala besar menjadi pilihan terakhir.

Seorang perempuan dari Barinas, negara bagian asal Hugo Chavez, tepat pada malam sebelum pemilihan menyatakan bahwa demokrasi telah lama terinfeksi, dan Chavez adalah antibiotiknya (Levitsky dan Ziblatt, 2020). Adagium yang sama juga berlaku di Indonesia. Ketika kepemimpinan Presiden Sukarno semakin sentralistik dengan Demokrasi Terpimpin, maka kelahiran Orde Baru oleh masyarakat awalnya dinilai sebagai falsifikasi, penataan ulang demokrasi sebagai homogenisasi ideologi yang menjadi isu globalisasi (Mulyadi, 2019). Adagium tersebut justru menjadi pil terpahit dalam realitas demokrasi Indonesia. Tidak berbeda dengan Rafael Caldera, selang beberapa lama setelah kemenangan Chavez yang menyatakan kepada publik terkait kekeliruan terbesarnya, karena berkorespondensi dengan salah satu demagog terbesar dunia. Maka terminologi Orde Baru menjadi eufemisme pembunuhan total terhadap oposisi. Pelembagaan oposisi menjadi entitas tidak bermakna, terorganisir dan terfragmentasi dengan brutal. Oposisi tidak memiliki ruang untuk menjalankan fungsi sebagai alternatif kredibel dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas demokrasi.

Orde Baru bahkan menjadi atraktor yang terus melakukan arus balik destruktif terhadap oposisi, sehingga semakin tenggelam dalam manipulasi realitas kekuasaan pribadi dan klien, yang diklaim karakteristik distingtif dari politik Afrika (Konings, 2017). Oposisi tidak mendapatkan kesempatan besar untuk berkoordinasi langsung dalam pencalonan satu sama lain karena fragmentasi, sulit melaksanakan kampanye dalam membantu calon selain petahana yang menarik respon dari masyarakat. Alih-alih seperti partai oposisi Turki yang dalam tujuh pemilihan umum memiliki menu koordinasi prima, berhasil menampilkan perlawanan terhadap yang berkuasa dengan konfigurasi anggota parlemen proporsional, dan mendapat kemenangan pemilihan daerah di sejumlah kota utama, justru lebih buruk dibandingkan dengan komposisi oposisi parlemen di demokrasi *Westminster* dengan sedikit potensi mempengaruhi pengambilan keputusan, mengingat strategi yang tidak terkoordinasikan secara baik (Kaiser, 2008). Penerapan koersi oleh Presiden Suharto menjadikan oposisi begitu tidak berdaya, serta terbagi dalam beberapa kekuatan kecil tidak berarti (Horowitz, 2014). Pelembagaan oposisi berada dalam titik nadir yang paling mengkhawatirkan.

Tidak terdapat jaminan terhadap kepentingan pelembagaan oposisi pada masa transisi, pasca reformasi. Oposisi bahkan tidak menuai kemenangan menakutkan, seperti yang dahulu terjadi ketika masa transisi demokrasi di kawasan Eropa Timur. Rezim kekuasaan Suharto justru tumbuh kembali dengan entitas baru, karena tentu pengganti Bapak Pembangunan itu, tidak lain orang yang pilih sendiri sebagai wakil Presiden dengan aturan masih rezim otoritarian. Liberalisasi yang dijalankan justru merupakan interpretasi penguasa yang tidak

sesuaiterhadap demokratisasi sendiri, sehingga tidak mengherankan terdapat tekanan oposisi jalanan yang digerakan oleh mahasiswa untuk mengembalikan pemerintahan pada pihak yang dipastikan dapat mendukung perubahan. Paling tidak pada masa itu, demokrasi memungkinkan tidak hanya partai politik sebagai oposisi, melainkan entitas non partai (Pickvance, 1998), media informasi (Aminah, 2016). Namun, partai oposisi sebagaimana masa dahulu kembali kehilangan taji kharisma pada kekuasaan Presiden Abdurahman Wahid dan Megawati (Noor, 2016), keduanya menjadi region magnetik yang menarik kekuatan politik dalam pusaran cakramangilingan pemerintah.

Semakin deterministik satu unsur dalam kelompok unsur, semakin berkurang kadar kebenaran tentang hubungan korelatifnya. W. Heisenberg, seorang fisikawan yang menemukan hukum *Indeterminacy*, membuktikan semakin tepat menentukan posisi objek bergerak, semakin berkurang probabilitas menetapkan kecepatan objek tersebut. Hal yang relevan juga terjadi dalam pemerintahan Dus Dur, koalisi terlihat sangat mapan dan menjanjikan. Namun, gaya kepemimpinan Gus Dur yang tampil unik dan tidak mudah diterima berbagai pihak, menjadi atraktor yang memberikan *feed back* destruktif terhadap stabilitas koalisi pemerintahan, sekaligus menciptakan jurang pertentangan dengan mayoritas parlemen. Pada taraf kulminasinya, kekuatan oposisi berhasil memakzulkan Gus Dur sebagai respon inheren dari dikeluarkannya Maklumat Presiden 23 Juli 2001 yang dinilai bertentangan dengan konstitusi (Huda, 2001). Setelah *impeachment* tokoh bangsa yang pluralis tersebut Megawati menjadi Presiden kharismatik wanita pertama dan berhasil menyelenggarakan pemerintahan sampai tahun 2004 dengan stabil, terlebih PDI-P sendiri menjadi partai pemenang pemilu pada tahun 1999.

Sekalipun pemilu bersejarah tahun 2004 masih bergelut dengan masalah besar pada demokrasi parlementer dulu, tumbuhnya otoritarianism intra partai, prevalensi politik uang, signifikansi platform politik terdegradasi, loyalitas partai yang rapuh, kebangkitan kartelisasi dan tumbuhnya elit politik lokal, tetap tidak dapat disangkal Pemilu 2004 merupakan puncak reformasi konstitusi dan demokrasi. Kharisma dari ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dapat menarik fragmentasi suara partai pada putaran pertama (Ananta, Arifin, dan Suryadinata, 2005), bahkan 1/3 pendukung PDI-P memilih SBY-JK pada pemilihan kedua (Liddle dan Mujani, 2007). Kekalahan dalam pemilihan Presiden secara langsung tersebut, menjadikan PDI-P dengan Megawati sebagai motor penggerak oposisi, terlebih dengan rentang kekuatan koalisi oposisi mencapai 317 kursi. Konfigurasi oposisi tersebut berubah dengan signifikan ketika Jusuf Kalla terpilih sebagai petinggi utama partai beringin. Kekuatan oposisi mengalami reduksi besar,

hanya mencapai 146 kursi di parlemen dengan tetap digawangi PDI-Perjuangan dan partai kecil.

Kemenangan SBY atas Megawati dan Jusuf Kalla pada pemilihan tahun 2009 dalam sekali putaran tidak terlalu mengherankan. Bukan hanya kharisma SBY yang menggiurkan pemilih, melainkan partai Demokrat sendiri mempunyai konstituensi dengan signifikansi konkrit, memiliki akar kuat dalam masyarakat, dan memainkan peran krusial dalam agregasi kepentingan masyarakat dengan memperhatikan kasus perekonomian dan kebijakan (Mujani dan Liddle, 2010). Perubahan hasil pemilihan umum tahun 2004 dan 2009 identik mengarah pada masalah undang-undang pemilu yang mayoritas dan kurang proporsional di kawasan Asia Timur serta Tenggara secara umum (Reilly, 2006). Perubahan demikian memberikan implikasi signifikan terhadap konfigurasi partai di parlemen dengan sembilan partai, mengalami tingkat kenaikan dibanding pemilihan sebelumnya, hanya tujuh partai. Namun secara lebih agregatif, tidak memberikan pengaruh menjanjikan terhadap kelembagaan oposisi. Hanya PDI-P, Hanura, dan Gerindra yang memainkan lakon drama kolosal sebagai oposisi dengan kekuatan politik parlemen hanya mencapai 136 kursi.

Walaupun konfigurasi kekuatan oposisi yang sangat ramping selama 10 tahun pemerintahan Presiden SBY, oposisi tetap dapat menjalankan peranan dengan baik. Peran krusial oposisi dengan PDI-P sebagai motor utama mencapai taraf kulminasi ketika koalisi oposisi memiliki pandangan yang berbeda sebagai diametral terbuka dengan pemerintah. Oposisi sangat gencar memberikan perhatian spesifik terhadap berbagai kasus sentral yang dinilai menjadi bentuk kegagalan pemerintah, sekaligus sebagai strategi permainan untuk mendapatkan perhatian publik. Ketika pemerintah dewasa itu sulit memberikan penyelesaian terukur berkenaan kasus *Exxon Mobile*, kenaikan Bahan Bakar Minyak, *Bail Out* Bank Century dan kasus lain, maka tentu isu sentral tersebut menjadi permainan menguntungkan untuk memajukan gerakan perjuangan oposisi (Ashokkumar, dkk, 2020). Pasca pemilihan umum tahun 2014, koalisi oposisi mengalami transformasi dalam entitas terbaru dengan Koalisi Merah Putih, hanya saja tetap tidak mampu memainkan lakon utama sebagai penyeimbang pemerintah karena diterpa badai visi pembangunan politik yang jauh berbeda. Atau oposisi tetap dinilai sebagai posisi yang tidak menguntungkan bagi partai politik.

Pada awal kepemimpinan Jokowi-JK, koalisi KMP telah menunjukkan kritikan terbuka terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak, perubahan dari APBN dengan alokasi spesifik pembangunan Badan Usaha Milik Negara dibandingkan pemberdayaan Potensi Desa, termasuk penolakan lugas terkait revisi UU KPK. Meskipun oposisi mendapatkan keuntungan dari

kebijakan pemerintah yang dinilai sangat tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, namun konsistensi pemerintah dalam menampilkan krusialitas kebijakan setidaknya dapat menjaga reputasi dan kredibilitas pemerintahan (Greene, 2018). Hal demikian jugadapat memberikan alasan mengapa serangan KMP tidak terlalu signifikan terhadap pengambilan kebijakan, terlebih tidak sedikit partai koalisi KMP seperti PAN, PPP dan Partai Golkar menampilkan manuver monumental dengan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Terdapat banyak kalangan yang menilai pecahnya koalisi dari KMP pasca pemilu, karena perbedaan dalam visi pembangunan politik. Sangat sulit untuk menerima bahwa perbedaan demikian menjadi dasar dari bergabungnya tiga partai oposisi ke dalam koalisi pemerintah. Karena bila memang perbedaan terbuka diantara partai Koalisi Merah Putih hadir sebagai samaran kontinum yang memang sulit untuk direkonsiliasi, maka akan sangat sukar membangun transaksi pragmatik yang menghasilkan keputusan pengusungan Prabowo sebagai calon presiden. Tidak menutup kemungkinan terdapat skenario yang jauh lebih kompleks daripada hanya sebatas perbedaan dalam melihat pembangunan politik.

Atau sesungguhnya runtuhnya KMP karena oposisi ditempatkan dalam klaim universalitas buruk dan baik yang mesti terlebih dahulu dipertanyakan. Karena akan selalu dipandang sebagai posisi dari berbagai pihak yang menelan kekalahan secara moral dalam perjalanan sejarah, oposisi menjadi fiksi komunitarian yang tidak akan dirasionalkan. Terkadang pengetahuan terkait oposisi tidak lain rekayasa penguasacara politik, yang sukar mendapatkan pengakuan penuh kehormatan. Pembatasan oposisi menjadi narasi panjang kekuatan penguasa, sehingga menjadi entitas posisi yang dinilai tidak menguntungkan dalam menginterpretasikan kepentingan politik. Padahal inkonsistensi partai politik dalam menunjukkan pandangan politik dengan melakukan manuver politik brutal untuk menerima suaka dari penguasa merupakan kesalahan dalam menjalankan idealisme dan preferensi partai yang tidak berujung. Konsistensi partai politik untuk menjadi oposisi dengan pandangan politik berbeda dengan pemerintah sesungguhnya memperlihatkan sektor diferensiasi besar dengan partai lain yang begitu mudah berubah haluan. Konsistensi sebagai oposisi bahkan secara tidak langsung menyatakan pada publik bahwa mereka tidak terjebak dalam rimba infinit transaksi politik penguasa dalam menjamin kepentingan politik. Tentu konsistensi demikian menempatkan partai bersangkutan dalam pemahaman secara mendalam tentang kebenaran dan kebebasan dalam demokrasi.

Koalisi Indonesia Hebat sebagai tandingan KMP pada awalnya tentu menjadi kesepakatan politik untuk mengusung Jokowi-JK oleh Hanura, Nasdem, PKB, dan PKP Indonesia dengan PDI-P

sebagai pemain protagonis utama. KIH bahkan hanya mempunyai modal kekuatan politik di parlemen mencapai 208 kursi, namun dengan bergabungnya beberapa partai yang awalnya percaya diri sebagai saingan, sanggup menjadikan KIH semakin mapan dengan peta kekuatan politik mencapai 386 kursi parlemen. Konstruksi prima untuk menjamin akselerasi pemerintahan. KMP sendiri sebagai kelompok oposisi pemerintah, semakin terpojok di sudut ring pertandingan dengan 174 kursi parlemen, menyisakan partai Demokrat, Gerindra, dan PKS. Pola reduksi oposisi ini, tidak jauh berbeda dengan konfigurasi kekuatan oposisi selama pemerintahan SBY yang tidak melebihi 150 kursi. Begitu sulit membayangkan pola demokrasi tanpa pelembagaan oposisi yang begitu proporsional. Melihat komposisi kekuatan politik yang kontras, maka oposisi akan mengalami hambatan untuk dapat melakukan penyeimbangan terhadap bergulirnya roda pemerintahan.

Reduksi demikian tidak menghalangi Partai Gerindra sebagaimana Gatra.com pernah memberikan kritikan terbuka terhadap pemerintahan dari Jokowi-JK terkait belum tercapainya 10 juta penyerapan tenaga kerja, nilai tukar rupiah yang semakin merosot, proses pemberantasan korupsi yang tidak pernah memuaskan dengan pola tidak mengedepankan pencegahan dan pembelahan partai politik begitu kasar untuk mendukung kebijakan pemerintah. Tanggal 3 November 2015, PKS sebagai oposisi cukup intensif memberikan kritik terhadap pemerintah dengan menyoroti masalah transformasi sektor ekonomi yang tidak memadai, pengelolaan APBN dilaksanakan secara tidak maksimal, penurunan tingkat kemakmuran dari masyarakat, penegakan hukum yang belum layak diapresiasi, termasuk pola konsolidasi politik yang masih fluktuatif sebagaimana pelaporan CNNIndonesia.com. Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua baru dari Partai Demokrat sebagaimana laporan Kompas.com 11 Juni 2018 menyampaikan kritik tentang daya beli masyarakat yang menurun, tarif listrik yang mengalami kenaikan, lapangan pekerjaan yang sangat terbatas, kritik Penpres No. 20 Tahun 2018 terkait pengaturan tenaga kerja dari luar, dan program revolusi mental yang kurang mendapatkan perhatian seksama.

Sebuah gagasan tertentu dapat menunjukkan eksistensi sebagai pandangan intelektualitas yang indah serta membawa kekuatan yang begitu membingungkan, namun dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dengan akselerasi tidak kalah membingungkan. Pelembagaan dari oposisi tidak berbeda dengan gagasan tersebut, hadir sebagai gagasan pembaharuan dalam memecahkan permasalahan yang sukar diantisipasi pemerintah secara komprehensif. Eksistensi oposisi dapat memberikan penerangan terhadap jalur gelap yang ditempuh pemerintah, karena oposisi mampu membantu menyingkap bayang gelap yang penuh

kealfaan penguasa. Pemilu tahun 2019 menjadi kesempatan terbuka untuk kelompok oposisi dalam mengungkapkan gagasan mengenai bagaimana membangun kehidupan kebangsaan dan kenegaraan bersama yang lebih baik dengan mengusung narasi perubahan yang mengagumkan. Partai politik yang memainkan peran antagonis oposisi termanifestasikan ke dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur dengan mengusung Prabowo-Sandi, yang memang diharapkan sebagai masyarakat dapat membawa angin perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apabila koalisi Prabowo-Sandi hanya didukung oleh Partai Demokrat, PAN, Gerindra, PKS, dan Partai Berkarya, maka lawan politik dengan Koalisi Indonesia Kerja ditopang oleh PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, PSI, Perindo, PKPI, PBB, untuk mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin. Pihak petahana secara konkrit mempunyai posisi yang sangat menguntungkan, selain konfigurasi koalisi yang lebih padat dan mumpuni, terlebih ditopang oleh elit politik sekaligus pimpinan partai dalam koalisi yang memiliki media informasi. Tidak ada yang keliru bila seorang petinggi partai memiliki media informasi, hanya menjadi sangat riskan. Media informasi harusnya menjadi entitas dalam kepemilikan publik, menyajikan pemberitaan yang seimbang dan tidak memihak, justru dapat dipergunakan sebagai sarana meluncurkan doktrin dan argumentasi politik, bahkan propaganda politik. Kondisi riskan tersebut terlihat sangat jelas ketika kasus pelanggaran HAM tahun 1998 yang melibatkan Prabowo kembali diungkap media yang dimiliki para elit politik. Sekalipun demikian, koalisi stabil petahana tidak dapat memberikan jaminan terhadap kemenangan pemerintah, karena koalisi Prabowo-Sandi didukung sebagian kalangan muslim dengan Ijtima ulama. Bahkan menjelang pemilihan, beberapa ulama terkemuka turut menyatakan dukungan langsung terhadap Prabowo-Sandi.

Tanggal 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum mengukuhkan kemenangan pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin yang telah berhasil memperoleh suara mencapai 85 juta lebih, sementara pasangan Prabowo-Sandi tertinggal jauh dengan persentase suara 44,5 persen. Detik News tanggal 23 Oktober 2019 melaporkan komposisi dari kabinet terdiri 18 menteri dari kelompok profesional, dan sisa kursi menteri lainnya dari kalangan partai koalisi pemerintah. Peristiwa yang menarik perhatian kalangan masyarakat tentang hasil pemilu dan susunan kementerian, tidak lain bergabungnya Gerindra sebagai lawan politik dalam tata koalisi pemerintah, bahkan Ketua Umum menjadi Menteri Pertahanan. Tidak sedikit kalangan yang menilai dinamika politik tersebut sebagai dagelan politik menggelikan, mengingat keduanya pernah terlibat dalam persaingan terbuka dalam pemilihan presiden dengan pola visi pembangunan politik yang sangat berbeda. Tidak berselang lama, Sandi-ga Uno turut

serta dalam pemerintahan, menggantikan posisi Wishnutama Kusubandio.

Sebagai implikasi rasional tentu oposisi kembali tereduksi, hanya menyisakan Demokrat, PAN, dan PKS dengan kekuatan politik diparlemen hanya mencapai 148 kursi, tidak berimbang dengan koalisi pemerintah yang menyentuh 427 kursi dalam parlemen. Bahwa perubahan pandangan partai politik untuk tidak memainkan lakon oposisi, bukan hanya karena rapuhnya konsistensi partai, melainkan pemain dengan keberhasilan dalam permainan politik secara sengaja membuka komunikasi dalam mengadakan transaksi politik bersama lawan politik. Penguasa menjadi klien yang mengajukan proposal perubahan dinamika politik dengan seluruh kalkulasi potensi politik, sementara mantan lawan politik tidak berbeda lagi dengan konsorsium yang menyediakan pelayanan akselerasi pemerintah, mendapatkan bayaran posisi dalam kabinet yang strategis. Padahal konsistensi spesifik oposisi terhadap berbagai kasus terbaru dalam kebijakan pemerintah bukan hanya menjadi diferensiasi dengan pola pemerintah, melainkan termasuk mencerminkan preferensi yang dipercaya. Bahwa preferensi dapat menjadi barometer orientasi arah partai (Suryadi, 2017).

Sekalipun pelembagaan oposisi hanya terkonsentrasi pada permasalahan yang spesifik dengan penolakan terhadap sejumlah kebijakan krusial pemerintah, namun telah memberikan kinerja cukup menjanjikan apabila disertakan dengan konsistensi pandangan politik sebagai visi pembangunan yang dianut terdahulu. Bagaimanapun oposisi menjadi salah satu sarana untuk masyarakat dalam membangun konstruksi dasar penentuan kebijakan pemerintah, karena sistem politik sendiri sangat sulit dan berbahaya tanpa pelembagaan oposisi. Secara normatif, posisi pelembagaan oposisi Indonesia masih bermasalah, terutama terkait konsistensi oposisi. Sedari reformasi 1998, terdapat tendensi signifikan konfigurasi peta kekuatan oposisi tidak memiliki resistensi memadai terhadap perubahan politik. Maka, tidak mengejutkan sejumlah partai yang mengusung calon presiden, justru berbalik arah pada pihak lawan yang berhasil memenangkan pemilihan. Kondisi tersebut dalam satu titik tidak mencoba mengutamakan berbagai perebutan kekuasaan antara partai. Namun pada titik lain, pihak yang memperoleh kemenangan gencar melembagakan usaha merangkul erat partai yang kalah ke dalam koalisi pemerintahan. Tidak dapat dipungkiri berbagai usaha tersebut dimaksudkan untuk menjamin stabilitas pemerintahan dan akselerasi pembentukan kebijakan yang dimotori pemerintah. Sebuah kondisi yang tidak jauh berbeda dengan kombinasi demokrasi konsensus dan mayoritas.

Lawan politik yang pada mulanya mencerminkan pandangan politik berbeda dengan pemerintah, justru menjadi barisan terdepan mendukung berbagai kebijakan guna menjamin

akselerasi kinerja pemerintah dan stabilitas politik, tanpa peduli lagi bagaimana idealisme yang tertuang dalam visi pembangunan politik meleleh dalam sanubari. Pemerintah memiliki kecenderungan untuk menempatkan kursi parlemen dalam pisau analisis yang relevan, menghapuskan garis demarkasi antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, memposisikan sebesar mungkin kekuatan politik parlemen dalam *framing* yang dikehendaki pemerintah. Tendensi demikian semakin tampak, ketika menyampaikan Visi Pembangunan Tahun 2019-2025, presiden menegaskan bahwa pelembagaan oposisi diperbolehkan selama tidak menimbulkan fragmentasi dan instabilitas berlebihan, sebagaimana laporan Kompas.com pada tanggal 15 Juli 2019. Dalam kesempatan lain, terkait dengan bergabungnya Gerindra dalam koalisi pemerintahan, Presiden menunjukkan pandangan politik yang kontradiktif bahwa demokrasi Indonesia bahkan tidak mengenal pelembagaan oposisi, melainkan tidak lebih dari demokrasi gotong royong sebagaimana pemberitaan Detik News tanggal 24 Oktober 2019. Tidak mengherankan pernyataan Presiden tersebut bahkan dinilai tidak kontekstual, kesalahan dalam memahami kualitas demokrasi, serta kekeliruan besar dalam melihat sistem pemerintahan sebagaimana dimuat dalam Depot Pikiran Rakyat tanggal 23 Februari 2021.

4. KESIMPULAN

Reduksi terhadap oposisi terjadi pada setiap rezim kekuasaan, mulai dari Orde Lama sampai dewasa ini, sekalipun dengan pola reduksi yang berbeda. Ketika masa Orde Lama dan Orde Baru, reduksi oposisi mempunyai tendensi spesifik mengarah pada koersi dengan intervensi langsung terhadap berbagai pihak, sehingga kekuatan oposisi semakin terfragmentasikan dalam berbagai unit terkecil yang tidak memiliki daya tekan terhadap pemerintah. Setelah amandemen keempat, dengan memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan politik, reduksi oposisi ditampilkan dalam pola kooptasi, penempatan mantan lawan politik dalam kabinet sebagai implikasi transaksi non-pragmatik dengan penguasa terpilih. Bagaimanapun juga pelembagaan oposisi merupakan ruh dari demokrasi, karena itu partai politik yang mengalami kekalahan dalam pemilu harus mempunyai resistensi dalam menghadapi kekuatan kooptasi penguasa yang menggiurkan, suatu tindakan yang disebut 'menjaga jarak' oleh Nancy Bermeo. Partai oposisi yang mendapatkan suka dari penguasaan menjadi partai yang kali pertama kehilangan kebebasan, karena harus mengenakan topeng yang dikehendaki pemerintah.

5. DAFTAR PUSTAKA

Aminah, S. (2006). Politik Media, Demokrasi, dan Media Politik. Masyarakat dan Kebudayaan, 19(3).

- Ananta, A Arifin., & Suryadinata, L. (2005). *Emerging Democracy in Indonesia*. ISEAS Publishing.
- Anggraeni, L. (2016). Transformasi Nilai Kesukarelaan sebagai Basis Political Engagement melalui Service Learning Di Universitas Pendidikan Indonesia. (Disertasi). Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Diakses dari <http://repository.upi.edu/26250/>.
- Anggraeni, L., & Ramdhani, H. (2018). Pencegahan Money Politic Dalam Pemilihan Umum Melalui Penguatan Kebijakan Non Penal. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 59-68. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13660>.
- Anggraeni, L., Darmawan, C., & Tanszil, S. W. (2020). "Cicomdi: Media Penguatan Bela Negara Bagi Generasi Milenial". Dalam Aditia Ismaya, Erik., & Ardianti, Sekar Dwi (Penyunting), *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bela Negara "Bela Negara Untuk Generasi Millennial"* (Hlm. 5 – 12). Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Arena, P. (2015). Crisis Bargaining, Domestic Opposition and Tragic Wars. *Journal of Theoretical Politics*, 27(1), 108–131. <https://doi.org/10.1177/0951629813516689>.
- Argenti, G. (2017). Pemikiran Politik Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 14-14.
- Ashokkumar. dkk. (2020). Censoring Political Opposition Online: Who does it and Why. *Journal of experimental social psychology*, 91, 104031. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2020.104031>.
- Brancati, D., & Lucardi, A. (2019). Why Democracy Protests do not Diffuse. *Journal of Conflict Resolution*, 63(10), 2354-2389. <https://doi.org/10.1177/0022002718815957>
- Bunce, V. (2000). Comparative Democratization: Big and Bounded Generalizations. *Comparative political studies*, 33(6-7), 703-734. <https://doi.org/10.1177/001041400003300602>.
- Clerici, Paula. (2020). Minorities at the Gate: The Legislative Contribution of Opposition Minorities and the Committee System. Evidence From Argentina. *The Journal of Legislative Studies*, 1–24. <https://doi:10.1080/13572334.2020.1741759>.
- CNN Indonesia. (2015). Lima Kritik PKS untuk Pemerintahan Jokowi. Tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151103163721-32-89211/lima-kritik-pks-untuk-pemerintahan-jokowi>.
- Coy, P. G., Woehrl, L. M., & Maney, G. M. (2008). A Typology of Oppositional Knowledge: Democracy and the U.S. Peace Movement. *Sociologica Research Online*, 13(4), 82–96. <https://doi.org/10.5153/sro.1739>.

- Crockett, D. A. (2003). Samson Unbound: Opposition Presidents and the Failure of Party Leadership. *The Social Science Journal*, 40(3), 371–383. [https://doi.org/10.1016/s0362-3319\(03\)00036-3](https://doi.org/10.1016/s0362-3319(03)00036-3).
- Daase, C., & Deitelhoff, N. (2019). Opposition and Dissidence: Two Modes of Resistance Against International Rule. *Journal of International Political Theory*, 15(1), 11–30. <https://doi.org/10.1177/1755088218808312>.
- Davidson, J. S. (2019). Special Issue on Institutions Under Pressure: Opposition to Privatized Infrastructure in Indonesia. *Review of International Political Economy*, 1–24. <https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1668461>.
- Demirkaya, B. (2019). What is Opposition Good For? *Journal of Theoretical Politics*. <https://doi.org/10.1177/09516298198331>.
- Detik News. (2019). Jokowi: Di Indonesia Tak Ada Oposisi, Demokrasi Kita Gotong Royong. Tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-4758805/jokowi-di-indonesia-tak-ada-oposisi-demokrasi-kita-gotong-royong>.
- Fadli, M. R. (2020). Pergumulan Partai Politik Islam pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 34-49.
- Fionna, U. (2016). The Trap of Pop-Charisma for the Institutionalization of Indonesia's Post-Suharto Parties. *Asian Journal of Political Science*, 24(1), 124–141. <https://doi.org/10.1080/02185377.2015.1136227>.
- Frantz, E. (2018). Voter Turnout and Opposition Performance in Competitive Authoritarian Elections. *Electoral Studies*, 54, 218–225. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.06.010>.
- Gatra. (2018). Ini Empat Kritik Gerindra Jelang Empat Tahun Pemerintahan Jokowi. Tersedia di <https://www.gatra.com/detail/news/355917-Ini-Empat-Kritik-Gerindra-Jelang-Empat-Tahun-Pemerintahan-Jokowi>.
- Greene, Z. (2020). Being Heard Above the Noise: The Role of Incumbent Issue Diversity in Election Campaigns. *Political Behavior*, 42, 487–507. <https://doi.org/10.1007/s11109-018-9504-2>.
- Hillman, B. (2012). Ethnic Politics and Local Political Parties in Indonesia. *Asian Ethnicity*, 13(4), 419–440. <https://doi.org/10.1080/14631369.2012.710078>.
- Horowitz, Donald. (2014). *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi Indonesia*. Terj. Daryatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, N. (2001). Kontroversi Dasar Hukum Sidang Istimewa MPR dan Maklumat Presiden 23 Juli 2001 (Tinjauan Yuridis Ketatanegaraan). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 8(16), 92-108.
- Kaiser, André (2008). *Parliamentary Opposition in Westminster Democracies: Britain, Canada, Australia and New Zealand*. *The Journal of Legislative Studies*, 14(1-2), 20–45. <https://doi.org/10.1080/13572330801920887>.
- Konings, Piet (2004). *Opposition and Social-Democratic Change in Africa: The Social Democratic Front in Cameroon*. *Commonwealth and Comparative Politics*, 42(3), 289–311. <https://doi.org/10.1080/1466204042000326190>.
- Kosterina, S. (2017). Why Vote for a Co-Opted Party? Endogenous Government Power Increases and Control of Opposition Politicians in Authoritarian Regimes. *Comparative Political Studies*, 50(9):1155-1185. <https://doi.org/10.1177/0010414016666855>.
- Kreide, R. (2021). A Strong Defence of Democracy: Introduction to a Symposium on Cristina Lafont's Book 'Democracy Without Shortcuts'. *Philosophy and Social Criticism*, 47(1), 3–6. <https://doi.org/10.1177/0191453720975050>.
- Levitsky, Steven., & Daniel Ziblatt. (2020). *Bagaimana Demokrasi Mati*. Terj. Zia Anshor. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Liddle, R. Williams., & Saiful Mujani. (2007). Leadership, Party, dan Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia. *Comparative Political Studies* 40(7), 832-857. <https://doi.org/10.1177/0010414006292113>.
- Louwerse T., & Otjes S. (2019). How Populists Wage Opposition: Parliamentary Opposition Behaviour and Populism in Netherlands. *Political Studies*, 67(2):479-495. <https://doi.org/10.1177/0032321718774717>.
- Ludger, Helms. (1998). Perspectives on Government and Opposition in Unified Germany. *Politics*, 18(3), 151-158. <https://doi.org/10.1111/1467-9256.00072>.
- Ludger, Helms. (2008). Studying Parliamentary Opposition in Old and New Democracies: Issues and Perspectives. *The Journal of Legislative Studies*, 14:1-2, 6-19, <https://doi.org/10.1080/13572330801920788>.
- Maeda, K. (2015). Determinants of Opposition Fragmentation: Parliamentary Rules and Opposition Strategies. *Party Politics*, 21(5), 763–774. <https://doi.org/10.1177/1354068813509512>.
- Martin, S. L. (2006). Book Review: Democracy Without Opposition in Japan: Opposition Failure in a One-Party Dominant State. *Comparative Political Studies*, 39(10), 1288–1291. <https://doi.org/10.1177/0010414006290830>.
- Mietzner, M. (2012). Ideology, Money and Dynastic Leadership: The Indonesian Democratic Party of Struggle, 1998–2012. *South East Asia Research*, 20(4), 511–531. <https://doi.org/10.5367/sear.2012.0123>.

- Mulyadi, Mohammad. (2019). *Falsifikasi Demokrasi: Berpikir Ulang Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Munadi. (2019). Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia. *Jurnal Resolusi*, 2(1), 1-20.
- Nasional Kompas. (2018). Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK. Tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/11/09355181/lima-kritik-ahy-untuk-pemerintahan-jokowi-jk?page=all>
- Nasional Kompas. (2019). Dua Pesan Untuk Oposisi dalam Pidato Visi Indonesia Jokowi. Tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/15/11243151/dua-pesan-untuk-oposisi-dalam-pidato-visi-indonesia-jokowi?page=all>.
- Niou, E., & Paolino, P. (2003). The Rise of the Opposition Party in Taiwan: Explaining Chen Shui-Bian's Victory in the 2000 Presidential Election. *Electoral Studies*, 22(4), 721-740. [https://doi.org/10.1016/s0261-3794\(02\)00010-0](https://doi.org/10.1016/s0261-3794(02)00010-0).
- Noor, F. (2016). Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1), 1-17.
- Noor, F. (2016). Perilaku Politik Pragmatis dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di Era Reformasi. *Masyarakat Indonesia*, 40(1), 57-74.
- Pedrazzani, A. (2017). Wasting or Saving Time? How Government and Opposition Parties Use Time During Legislative Debates. Evidence From the Italian Case. *The Journal of Legislative Studies*, 23(3), 439-464. <https://doi.org/10.1080/13572334.2017.1361206>.
- Pickvance, K. (1998). Democracy And Grassroots Opposition in Eastern Europe: Hungary and Russia Compared. *The Sociological Review*, 46(2), 187-207. <https://doi.org/10.1111/1467-954X.00116>.
- Pikiran Rakyat Depok. (2021). Jokowi Dinilai Keliru Sebut Tak Butuh Oposisi. Tersedia di <https://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-091482466/jokowi-dinilai-keliru-sebut-tak-butuh-oposisi-refly-harun-demokrasi-tidak-jalan-kalau-hanya-satu-urus-saja>.
- Pratama, Alip D. (2018). Perbandingan Dinamika Oposisi di Indonesia dan Turki dalam Perspektif Teori Demokrasi dan Konstitusional. *Jurnal Thengkyang*, 2(1), 1-20.
- Pratama, D. Z. (2020). Koalisi Semu Partai Oposisi di Indonesia. *Jurnal Transformatif*, 1(1), 69-77.
- Ramadhan, Muhammad Nur., & Jimmy, Berlianto Oley. (2018). Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(1), 169-180. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.379>.
- Reilly, Benjamin. (2006). *Democracy and Diversity: Political Engineering in the Asia-Pacific*. Oxford: Oxford University Press.
- Resnick, D. (2012). Opposition Parties and the Urban Poor in African Democracies. *Comparative Political Studies*, 45(11), 1351-1378. <https://doi.org/10.1177/0010414012437166>.
- Rishan, I. (2020). Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 219-240.
- Seeberg, H. B. (2020). The Impact of Opposition Criticism on The Public's Evaluation of Government Competence. *Party Politics*, 26(4), 484-495. <https://doi.org/10.1177/1354068818792578>.
- Selçuk, O., & Hekimci, D. (2020). The Rise of the Democracy-Authoritarianism Cleavage and Opposition Coordination in Turkey (2014-2019). *Democratization*, 27(8), 1496-1514. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1803841>.
- Sherlock, S. (2012). Made by Committee and Consensus: Parties and Policy in the Indonesian Parliament. *South East Asia Research*, 20(4), 551-568. <https://doi.org/10.5367/sear.2012.0121>.
- Sitter, N. (2001). The politics of Opposition and European Integration in Scandinavia: Is Euro-Scepticism a Government-Opposition Dynamic?. *West European Politics*, 24(4), 22-39. <https://doi.org/10.1080/01402380108425463>.
- Somer M., & McCoy J. (2019). Transformations Through Polarizations and Global Threats to Democracy. *The Annals Of The American Academy Of Political And Social Science*, 681(1):8-22. <https://doi.org/10.1177/0002716218818058>.
- Suryadi, Karim. (2017). *Menak Senayan: Arsitek Komunikasi Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Wantchekon, L. (2003). Clientelism and Voting Behavior: Evidence from a Field Experiment in Benin. *World politics*, 399-422. <https://www.jstor.org/stable/25054228>.
- White, D. (2006). *The Russian Democratic Party Yabloko: Opposition in a Managed Democracy*. Ashgate Publishing.
- Ziegfeld, A., & Tudor. (2017). How Opposition Parties Sustain Single-Party Dominance: Lessons From India. *Party Politics*, 23(3), 262-273. <https://doi.org/10.1177/1354068815593455>.